**USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) 21 MARET 2025**

Anggaran Dasar Saat Ini	Usulan Perubahan Anggaran Dasar	Rujukan Peraturan
<p>Direksi Pasal 11 ayat 2</p> <p>Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan di bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lain serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.</p>	<p>Direksi Pasal 11 ayat 2</p> <p>Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tetap memenuhi kriteria, persyaratan, mekanisme dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, bidang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini.</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Pasal 9)</p>
<p>Direksi Pasal 11 ayat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. 	<p>Direksi Pasal 11 ayat 4</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dengan tetap memperhatikan mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, bidang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Khusus untuk pemberhentian atau penggantian sebelum periode masa jabatan berakhir direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Pasal 11)</p>

<p>Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 ayat 4 huruf a (i)</p> <p>Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:</p> <p>(a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:</p> <p>(i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang - Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, atau</p>	<p>Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 ayat 4 huruf a (i)</p> <p>Direksi mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat untuk:</p> <p>(a) meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:</p> <p>(i) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, atau</p>	<p>Penyesuaian dasar regulasi</p>
<p>Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 ayat 4 huruf b (i)</p> <p>(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:</p> <p>(i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; atau</p>	<p>Tugas dan Wewenang Direksi Pasal 12 ayat 4 huruf b (i)</p> <p>(b) mengikat Perseroan sebagai penjamin atau penanggung utang (borgtocht), atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran pihak lain:</p> <p>(i) yang merupakan pihak terkait sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum; atau</p>	<p>Penyesuaian dasar regulasi</p>
<p>Dewan Komisaris Pasal 14 ayat 2</p> <p>Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, peraturan Bank Indonesia, dan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.</p>	<p>Dewan Komisaris Pasal 14 ayat 2</p> <p>Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tetap memenuhi kriteria, persyaratan, mekanisme dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, di bidang perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini.</p>	<p>POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Pasal 41)</p>

<p>Dewan Komisaris Pasal 14 ayat 4</p> <p>Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.</p>	<p>Dewan Komisaris Pasal 14 ayat 4</p> <p>a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.</p> <p>b. Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (Pasal 43)</p>
<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 1</p> <p>Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 1</p> <p>Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ditempatkan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi sebagai Kantor Induk dari Kantor Cabang Syariah Perseroan.</p>	<p>POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 3)</p>
<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 2</p> <p>Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan; bertugas sebagai pengawas kegiatan usaha Kantor Cabang Syariah Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah; berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan Prinsip -Syariah; dan berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah 	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 2</p> <p>DPS mempunyai tugas dan wewenang yang terpisah dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan tanggung jawab serta fungsi utama DPS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan; bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut; berfungsi sebagai penasihat dan pemberi opini kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan Bank sesuai prinsip Syariah dan hal lainnya yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan di bidang perbankan syariah; berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah 	<p>- POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 20)</p> <p>- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah</p>

<p>Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional</p>	<p>Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan atau regulator terkait apabila diperlukan; e. memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p>	<p>bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.</p>
<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 3</p> <p>Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib</p> <ol style="list-style-type: none"> mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan - Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional; dan Setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 3</p> <p>Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan setiap perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan pada Perseroan wajib memiliki dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 	<p>POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>
<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4</p> <p>Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan mengindahkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (a)</p> <p>Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.</p>	<p>POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p>
<p>belum diatur</p>	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (b)</p> <p>DPS terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPS wajib dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.</p>	<p>POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 10 dan pasal 11)</p>

belum diatur	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (c)</p> <p>Para anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS di mana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan tetap memenuhi kriteria, persyaratan, mekanisme dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 14)
belum diatur	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (d)</p> <p>Pemberhentian atau penggantian anggota DPS yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota DPS berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 16)
belum diatur	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (e)</p> <p>Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Anggota DPS yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut. Anggota DPS yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai anggota DPS sesuai ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.</p>	POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 14)
belum diatur	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (f)</p> <p>Seorang anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota DPS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan</p>	POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 17)

	<p>peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pengunduran diri anggota DPS dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
belum diatur	<p>Dewan Pengawas Syariah dan Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah Pasal 17 ayat 4 (g)</p> <p>Seorang anggota DPS yang diangkat untuk menggantikan anggota DPS yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau mengisi yang lowong, diangkat untuk sisa masa jabatan dari anggota DPS yang sedang menjabat.</p>	POJK No 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Pasal 15)
<p>Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan Pasal 18 ayat 2</p> <p>Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan Bank Indonesia.</p>	<p>Rencana Kerja, Tahun Buku, dan Laporan Tahunan Pasal 18 ayat 2</p> <p>Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Penyesuaian dasar regulasi